

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS (PTMT) DI MASA PANDEMI

Risya Amalia¹, Evi Satispi², Diaz Tarakarti Gusman³, Holiseh⁴, Annisa Miskiyh⁵

^{1,2,3,4,5}Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Corresponding author risya.amalia01@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada seluruh aspek. Tingkat penyebaran dan tingginya angka kasus positif memaksa seluruh manusia untuk beradaptasi dan mengalami perubahan situasi kondisi demi mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19. Dimulai dari diadakannya pembelajaran jarak jauh yang pada akhirnya menimbulkan beberapa dampak negatif. Sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk melaksanakan kebijakan baru yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka merupakan sebuah alternatif yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegahnya turunan capai belajar (learning loss) yang diakibatkan adanya pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mencari beberapa referensi melalui jurnal, buku dan web mengenai informasi terkait implementasi pembelajaran tatap muka ini. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang memiliki beberapa indikator diantaranya, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pertemuan tatap muka ini sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator komunikasi pun dalam sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari aspek sumber daya pun sudah dapat berjalan dengan maksimal, karena dimulai dari tenaga pendidik pun sudah banyak yang melakukan vaksinasi. Dalam aspek disposisi pun sudah adanya dukungan yang optimal dimulai dari pembuat kebijakan, dinas kependidikan, satuan pendidikan, para tenaga pendidik serta para orang tua yang juga berperan andil dalam mendukung berjalannya kebijakan pertemuan tatap muka. Terakhir dalam struktur birokrasi pun dalam sistem birokrasinya sudah sangat mendukung dalam kebijakan pertemuan tatap muka ini supaya terciptanya peserta didik yang cerdas dan tidak ada lagi yang mengalami hilangnya capaian belajar (learning loss).

Kata kunci: implementasi; PTM; kebijakan publik; pendidikan; covid-19

IMPLEMENTATION OF LIMITED FACE-TO-FACE LEARNING (PTMT) POLICIES DURING THE PANDEMIC

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a profound impact on all aspects. The rate of spread and the high number of positive cases force all humans to adapt and experience changing conditions in order to prevent the spread of the COVID-19 virus. Starting from the holding of distance learning which in the end caused some negative impacts. So the government is considering implementing a new policy, namely limited face-to-face learning. Face-to-face learning is an alternative provided by the government to prevent learning loss caused by distance learning due to the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the implementation of face-to-face learning during the COVID-19 pandemic. This study uses a literature study method by looking for several references through journals, books and the web regarding information related to the implementation of face-to-face learning. This study uses Edward III's theory which has several indicators including, Communication, Resources, Disposition, and

Bureaucratic Structure. The results of the study also show that the implementation of the face-to-face meeting policy has been going well. Judging from the communication indicators, the socialization has been going well. Judging from the aspect of resources, it has been able to run optimally, because starting from the educators, many have carried out vaccinations. In terms of disposition, there has been optimal support starting from policy makers, education offices, education units, educators and parents who also play a role in supporting the implementation of face-to-face meeting policies. Lastly, in the bureaucratic structure, the bureaucratic system has been very supportive in the policy of this face-to-face meeting so that the creation of intelligent students and no more experiencing loss of learning achievement (learning loss).

Keywords: implementation; PTM; public policy; education; covid-19

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan ialah sebuah tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, bila melalui prosedur ini suatu proses kebijakan keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Salah satunya adalah implementasi kebijakan pertemuan tatap muka yang dikeluarkan oleh pemerintah terkhusus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk peningkatan capai belajar para pendidik di masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada seluruh aspek. Tingkat penyebaran dan tingginya angka kasus positif memaksa seluruh manusia untuk beradaptasi dan mengalami perubahan situasi kondisi demi mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19. Akibatnya banyak aspek yang terkena dampaknya seperti, bidang ekonomi, sosial, dan serta bidang pendidikan pun menjadi salah satu aspek yang terdampak covid-19. Maka dari itu dunia pendidikan merubah sistem proses pembelajaran menjadi daring (online/PJJ) demi mencegahnya penularan covid-19. Tetapi selama hampir dua tahun ini dalam praktik pembelajaran jarak jauh/online memiliki kekurangan pada proses pembelajarannya sehingga dapat dikatakan tidak terlalu efektif.

Sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk melaksanakan kebijakan baru yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka merupakan sebuah alternatif yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegahnya turunan capai belajar (learning loss) yang diakibatkan adanya pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi covid-19. Dengan adanya covid-19 ini mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan yang secara mendasar dalam dunia pendidikan. Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah telah mengatur mekanisme pembelajaran dari rumah sehingga perlu diulik kembali mengenai pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan luring, daring atau kombinasi.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) BDR pada lembaga pendidikan berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran dan evaluasi. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10 bulan setelah diberlakukannya PJJ menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menurun selama menggunakan sistem PJJ. Tentu saja permasalahan di atas tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri, dan pemerintah harus mengatasinya melalui kebijakan publik yang memperhitungkan

hambatan dan kemungkinan yang ada untuk mencapai tujuannya.

Melihat dari kondisi tersebut maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan semua satuan pendidikan bisa langsung dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Tetapi tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan karena itu prioritas utama yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan pertemuan tatap muka di masa pandemi ini serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa Pandemi.

Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dilakukan oleh wilayah Indonesia yang dalam kategori zona hijau atau bisa dilihat pada masa PPKM level satu sampai dengan tiga. Jika wilayahnya memasuki kategori tersebut maka kebijakan pembelajaran tatap muka ini dapat dilakukan oleh tenaga satuan pendidik.

Sebelum diterapkan secara luas pun, pemerintah harus mempersiapkan strategi sehingga nantinya kebijakan pembelajaran tatap muka ini dapat menjadi suatu alternatif yang baik, bermanfaat dan menghasilkan output yang optimal. Sehingga tercapainya susunan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan utama disini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas Dimasa Pandemi Ini?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

mendeskripsikan secara mendetail terkait implementasi Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Di Masa Pandemi dengan menggunakan teori Edward III.

Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) pengertian implementasi adalah kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu (atau kelompok) pribadi yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk keduanya upaya untuk mengubah keputusan ke dalam istilah operasional, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Untuk mengatasi implementasi sebuah kebijakan dibutuhkan pendekatan yang mengacu pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran masyarakat. Pemerintah, tenaga satuan pendidikan, orang tua atau wali muri

harus tetap bekerja sama dalam implementasi kebijakan ini.

George Edward III (1980) menyatakan bahwa pelaksanaan tidak akan berhasil jika tidak mengikuti pedoman untuk masyarakat umum. Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, hal yang perlu diperhatikan ada empat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi; Komunikasi merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan tahu apa yang mereka coba lakukan. Informasi yang diketahui oleh pengambil keputusan hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: komunikasi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber Daya; Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya penting untuk menerapkan kebijakan yang baik. Indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar suatu sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31-32), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan

baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Lebih lanjut dijelaskan menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:151), kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumber daya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah sumber daya saja tidaklah cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan sumber daya dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi; Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan : “Disposisi merupakan salah-satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau dukungan terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan kemungkinan akan berjalan sesuai dengan keputusan semula. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Dengan adanya komitmen dan kejujuran dari para implementor akan menunjukkan antusias dalam melaksanakan tahap-tahap

program secara konsisten. Sikap yang adil akan menumbuhkan kesan yang baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.

4. Struktur Birokrasi; Respon birokrasi dalam struktur organisasi birokrasi sebagai konduktor kebijakan nasional, merupakan suatu hal yang dinilai sangat penting. Permasalahan dalam hal ini adalah tidak adanya pembagian birokrasi dalam proses implementasi kebijakan publik, sehingga implementasinya tidak efisien. Edward III secara singkat menjelaskan bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas, atau konsisten memberi pengembang kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Kebijaksanaan ini dapat diterapkan baik secara langsung atau melalui bimbingan tambahan untuk pelaku tingkat bawah. Komunikasi yang buruk menyebabkan disposisi.

Namun, komunikasi yang terlalu rinci mempengaruhi moral dan kemandirian pelaku, mengubah tujuan, dan menyia-nyaiakan sumber daya seperti keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Sumber daya terkait dengan komunikasi dan memengaruhi penerapan selama implementasi.

Demikian pula, disposisi seorang penegak atau implementor sangat mempengaruhi bagaimana ia menafsirkan pesan kebijakan ketika diterima dan mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

METODE

Bagian ini merupakan penjelasan mengenai cara, waktu, subjek, dan instrumen, yang digunakan secara ringkas, jelas dan rinci dalam kajian yang dilakukan. Bagian ini menjelaskan cara penelitian

dilakukan serta dilengkapi dengan uraian tentang bahan, peralatan, dan tata laksana yang digunakan dalam melakukan analisis ataupun penelitian. Uraian dapat diperjelas menggunakan gambar, skema, grafik, atau tabel. Setiap gambar dan tabel diberi nomor yang berurutan mulai dari 1, 2, 3 hingga gambar atau tabel terakhir. Keterangan gambar dan tabel didahului dengan kata “Gambar” atau “Tabel” dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman 10 poin dan rata tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Edward III yang akan digunakan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Di Masa Pandemi, terdapat beberapa indikator yang bisa diteliti menurut teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Organisasi, berikut implementasi kebijakan dari aspek-aspek tersebut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik diperlukan untuk implementasi kebijakan, khususnya komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini seluruh masyarakat dalam bidang pendidikan, (tenaga pendidik, peserta didik, orang tua pendidik dll). Komunikasi ini harus menjadi sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, karena komunikasi yang terjalin dengan baik maka dalam implementasi kebijakan pun akan baik pula.

Komunikasi yang baik pun terbagi menjadi tiga bagian yaitu adanya transmisi, kejelasan dan konsistensi. Jika dilihat dalam posisi transmisi disini ialah penyaluran

komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat mengenai pertemuan tatap muka ini dilakukan sosialisasi secara virtual dan melalui media massa seperti website resmi kemendibud, instagram dan portal-portal web berita. Pemerintah pun mengeluarkan buku saku atau buku panduan untuk penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini. Didalam buku saku ini cukup banyak menjelaskan bagaimana cara persiapan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini.

Gambar 1. Informasi Mengenai Buku Saku



DAFTAR ISI	
Tanya Jawab Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.....	5
Seperti apa kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19)??	5
Kapan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh wajib diberikan oleh sekolah?.....	5
Apakah artinya vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi syarat sebelum dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas? Bagaimana dengan sekolah yang sudah/akan memulai pembelajaran tatap muka terbatas tetapi pendidik dan tenaga kependidikan belum divaksin?.....	5
Bagaimana jika orang tua belum nyaman anaknya melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah?.....	6
Apa yang perlu dipersiapkan sekolah menghadapi penyelenggaraan pembelajaran setelah vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan?.....	6
Bagaimana peran pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemendikbud dalam memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman?.....	6
Bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilaksanakan?.....	7
Seperti apa aturan pelaksanaan masa transisi dan masa kebiasaan baru pada pembelajaran tatap muka	

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Terlihat dalam gambar diatas buku saku tersebut sudah memberikan informasi terkait panduan penyelenggaraan pertemuan tatap muka yang memang harus dilakukan dan diperhatikan oleh tiap masing-masing sekolah yang sudah siap dalam menjalankan kebijakan pertemuan tatap muka ini.

Yang selanjutnya bagian dari komunikasi adanya kejelasan yang artinya komunikasi yang akan diterima oleh pelaksana kebijakan ini dapat dimengerti dan jelas. Pemerintah pun dalam langkah

awal untuk memberikan informasi ini menginfokan melalui surat yang akan dituju kepada pemerintah daerah, dari sini dilanjutkan kembali disosialisasikan ke masing-masing sekolah yang berada di daerah tersebut. Setelah itu dari pihak sekolah yang akan mempersiapkan sosialisasi terkait pertemuan tatap muka ini kepada setiap orang tua para peserta didik.

Dan bagian dari komunikasi yang terakhir adalah konsistensi yang dimana konsistensi ini merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaannya harus konsisten dan jelas untuk terus diterapkan dan dijalankan. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan pertemuan tatap muka ini dibagi menjadi dua (2) fase yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Masa transisi akan berlangsung selama dua (2) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas disatuan pendidikan. Masa kebiasaan baru ini dilakukan setelah masa transisi selesai maka pembelajaran tatap muka ini memasuki kebiasaan baru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dalam indikator komunikasi ini pemerintah sudah memberikan informasi dan sosialisai terkait kebijakan pertemuan tatap muka ini dengan baik dan jelas sehingga dalam pelaksanaannya pun bisa berjalan dengan baik dan lancar.

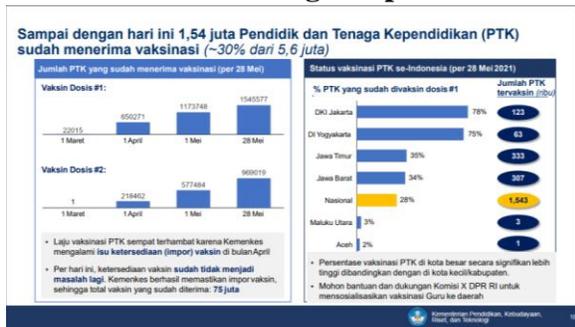
2. Sumber Daya

Implementasi dapat dikerjakan secara baik, jelas dan konsisten tetapi jika memiliki kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan maka dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dapat dikatakan bahwa sumber daya memiliki peran penting dalam sebuah instansi untuk pengimplementasian suatu kebijakan.

Sumber daya ini komponen yang perlu diperhatikan secara lebih, karena dengan tidak adanya sumber daya ini maka untuk pengimplementasian suatu kebijakan ini hanya akan menjadi sebuah konsep atau rencana yang tidak akan memiliki pengaruh lebih jauh dalam memecahkan sebuah permasalahan. Sehingga dalam point sumber daya ini perlu dipersiapkan supaya menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk sumber daya yang akan melaksanakan kebijakan pertemuan tatap muka ini harus mempersiapkan banyak hal seperti para tenaga pendidik diharuskan sudah melakukan vaksinasi serta harus dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan kebijakan pertemuan tatap muka ini. Serta tenaga pendidikan pun wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

Gambar 2. Penerimaan Vaksin Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

a. Staff pelaksana

Staff pelaksana disini ialah tenaga pengajar atau guru dan juga seluruh satuan pendidikan. Yang perlu diperhatikan disini ialah satuan pendidik wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan

pertemuan tatap muka. Setelah itu pembelajaran tatap muka terbatas harus dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Dalam pengaturan pembelajaran jarak jauh inipun harus diatur penjadwalan pembelajaran PTM dan PJJ tersebut:

1. Pengelompokan/bubble, yaitu pengelompokan peserta didik pada kelompok kecil beserta guru, sehingga hanya beberapa yang beraktivitas pada kelompok tersebut.

2. Shifting, yaitu pembagian kelas pagi-siang, PJJ-PTM. Hal ini disesuaikan dengan surat edaran oleh dinas Pendidikan Kabupaten.

Gambar 3. Contoh Pengaturan Jadwal Pembelajaran Shifting

Pengaturan Jadwal Pembelajaran (2/2)
 Contoh Pengaturan Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tingkat SD (2x/minggu)

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ
2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
3	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
4	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ
5	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
6	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)

Sumber: Buku Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

b. Informasi

Informasi disini memberikan arahan untuk persiapan dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan. Dalam rangka mengurangi dampak dari PJJ (pembelajaran jarak jauh) seperti learning loss (turunnya capai belajar) selama pandemi covid-19 maka dalam pelaksanaan PTM (pertemuan tatap muka) ini perlu dipersiapkan dengan cermat dan hati-hati.

PTM inipun bisa dilaksanakan dalam situasi zona hijau atau dalam masa PPKM

level 1-3, selebihnya yang belum memasuki kriteria tersebut belum diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan PTM terbatas di setiap daerahnya. PTM terbatas ini dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:

1. Masa Transisi, berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya PTM terbatas di satuan pendidikan.
2. Masa Kebiasaan baru, yaitu setelah masa transisi selesai maka PTM terbatas memasuki masa kebiasaan baru.

Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Bulan I : 50%	100%
Bulan II : 100%	

Keterangan:

- o Pada masa transisi, PTM terbatas di bulan I diikuti oleh maksimal 50% dari jumlah peserta didik, dengan pengaturan kegiatan pembelajaran seperti contoh table diatas.
- o Pada masa transisi PTM terbatas di bulan II dapat diikuti 100% peserta didik.
- o Pada masa kebiasaan baru yaitu setelah terbentuknya budaya kesehatan dan keselamatan diri terhadap penularan covid-19 maka kegiatan dapat diikuti oleh 100% peserta didik.

c. Fasilitas

Fasilitas disini ialah sarana dan prasarana apa saja yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kebijakan pertemuan tatap muka ini. Berikut daftar fasilitas yang harus disiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas:

1. Ketersediaan Sarana Sanitasi Dan Kebersihan
 - a) Toilet atau kamar mandi bersih.
 - b) Sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
 - c) Disinfektan.

- d) Air bersih untuk keperluan membersihkan sekolah dan cuci tangan.
 - e) Alat-alat kebersihan dan disinfeksi seperti ember, kain pel, kain microfiber/lainnya dan sprayer.
 - f) Sarung tangan dan masker.
2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
 - a) Mampu mengakses fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - b) Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - c) Thermogun (pengukur suhu tubuh).
 - d) Form-form pemantauan kesehatan.
 - e) Masker cadangan sesuai usia (terutama untuk peserta didik TK/RA dan SD/MI).
 - f) Peralatan kesehatan di ruang UKS.
 - g) Obat-obatan sederhana di ruang UKS.
 3. Disposisi

Dukungan para pelaksana terhadap kebijakan pertemuan tatap muka ini ialah terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Mereka berperan besar untuk mengarahkan dan juga memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dengan aman. Kepala dinas pendidikan pun mengarahkan tugas kepada para satuan pendidik untuk melakukan verifikasi dan evaluasi dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka berdasarkan pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS.

Selain itu setelah satuan tenaga pendidik sudah lolos dan bisa untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka ini, tak lupa juga

tentunya kebijakan ini perlu adanya dukungan dari para orang tua/wali murid para peserta didik. Karena dalam kebijakan ini tidak hanya dari kesiapan para pemerintah tetapi perlunya juga kesiapan dari para orang tua/wali murid untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pertemuan Tatap Muka ini.

Para satuan pendidik bisa dikatakan sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik, dengan banyaknya daerah yang sudah melaksanakan Kebijakan Pertemuan Tatap Muka ini dapat disimpulkan jika para satuan pendidik benar-benar sudah menyiapkan segala hal persiapan untuk menghadapi Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Ini, sudah mengikuti arahan sesuai yang telah diberikan oleh dinas pendidikan tersebut. Disinipun peran orang tua/wali murid bisa berperan untuk mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Tatap Muka atau masih ingin melakukan Pembelajaran Jarak Jauh. Dengan begitu sudah menjadi bentuk tanggung jawab dari dinas pendidikan untuk tetap mengawasi dan mengarahkan dalam pelaksanaan Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Ini, serta merealisasikan Pertemuan Tatap Muka ini dengan aman dan nyaman.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksana serta terlibat dalam suatu kegiatan, identitas dari birokrasi tidak hanya disebut sebagai struktur pemerintahan saja, melainkan terdapat organisasi swasta lainnya yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Melakukan sebuah implementasi harus bersifat kompleks karena akan melibatkan kerja sama dengan pihak lain, sehingga apabila kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik maka tidak akan berjalan sesuai prosedur yang

telah direncanakan. Maka implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan tidak efektif dikarenakan struktur birokrasinya terjadi ketimpangan.

Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pertemuan tatap muka ini sudah adanya sinergitas antara kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan para satuan pendidik. Untuk yang bertanggung jawab besar dalam hal ini pun dari kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota beserta jajarannya yang memiliki kewenangannya sebagai berikut:

- a. Bersama dengan satuan tugas covid-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan.
- b. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- c. Bersama satgas covid-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi aktif.
- d. Melakukan penanganan kasus dan memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif covid-19 di satuan pendidikan.

Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan segenap stakeholder lainnya telah berperan menjadi aktor utama yang sangat penting serta menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pertemuan tatap muka ini. Kesuksesan pelaksanaan kebijakan pertemuan tatap muka ini tentunya harus memiliki dukungan dari berbagai pihak yang

terlibat serta diperlukannya kinerja dan komunikasi yang baik.

Adapun dampak positif atau kelebihan dalam pelaksanaan pertemuan tatap muka ini yaitu:

1. Memulihkan kondisi psikisional peserta didik. Dengan diadakannya pembelajaran tatap muka ini supaya mengurangi dan memulihkan stress yang dialami para peserta didik selama pembelajaran online. Serta meningkatkan sikap emosional (pemalu, emosi berlebihan, keengganan untuk berinteraksi dengan satu sama lain) para peserta didik.
2. Meminimalisasi hilangnya kesempatan / minat belajar (learning loss) bagi peserta didik. Dengan diadakannya pembelajaran tatap muka, diharapkan para peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa tertinggal materi ataupun kebingungan saat menerima materi. Jikalau para peserta didik masih sulit mencapai pembelajarannya, sudah menjadi tugas tenaga pendidik yang harus mulai perlahan untuk membantu perkembangan pengetahuan para peserta didiknya.
3. Memperkuat kembali pendidikan karakter peserta didik. Dengan diadakannya pembelajaran tatap muka ini memudahkan para tenaga pendidik melihat dan mengukur karakter-karakter para peserta didiknya. Dengan begitu memudahkan berinteraksi dan menganalisis secara langsung untuk perkembangan karakter setiap para peserta didik.
4. Mengembalikan interaksi positif seluruh komponen satuan pendidikan. Dengan diadakannya pembelajaran tatap muka ini karena komunikasi tatap muka langsung masih dianggap paling ideal karena

proses komunikasi dan sosialisasi akan terjalin secara langsung. Informasi dan materi yang akan diberikan juga akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh peserta didik.

Selain memiliki kelebihan, dalam pertemuan tatap muka ini pun memiliki kekurangan seperti dengan adanya pertemuan tatap muka ini bisa saja menjadi sebuah cluster baru dalam kasus penyebaran covid-19 ini. Jika pelaksanaan pertemuan tatap muka ini ditiadakan maka akan menimbulkan dampak lain, dampaknya ialah akan terjadinya stress yang dialami para peserta didik selama pembelajaran online, serta hilangnya minat belajar (learning loss) bagi para peserta didik. Dengan begitu dapat dikatakan jika pertemuan tatap muka ini telah menimbulkan dampak positif maka kebijakan ini sudah bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pertemuan tatap muka di masa pandemi ini sudah lumayan cukup berjalan dengan baik. Jika dilihat dalam sosialisasi mengenai kebijakan pertemuan tatap muka ini, dari pihak satuan pendidikan pun sudah melaksanakannya dengan baik, sehingga sudah banyak juga sekolah yang bisa menjalani pertemuan tatap muka ini. Adanya sinergi komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para satuan pendidikan sehingga pelaksanaan pun berjalan dengan baik. Adapun informasi tambahan mengenai kebijakan pertemuan tatap muka sudah ada dan diinformasikan dalam bentuk buku saku dan juga ada pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi dapat dikatakan komunikasi telah berjalan dengan baik.

Dilihat dari aspek sumber daya pun sudah dapat berjalan dengan maksimal, karena dimulai dari tenaga pendidik pun sudah banyak yang melakukan vaksinasi. Dalam informasi pengarahannya para tenaga pendidik dalam kebijakan pertemuan tatap muka ini sudah berjalan maksimal. Untuk perencanaan pembelajarannya pun sudah jelas. Dimulai dari penyusunan RPP yang dibuat sesuai dengan kondisi pandemi covid-19, pelaksanaan pembelajaran yang diatur pula sesuai rencana yang telah ditentukan begitupula dengan evaluasi dan penilaian. Serta fasilitas-fasilitas kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini pun sudah dapat dikatakan maksimal sudah dilengkapi dengan baik oleh para satuan pendidikan.

Dilihat dari aspek disposisi pun sudah adanya dukungan yang optimal dimulai dari pembuat kebijakan, dinas kependidikan, satuan pendidikan, para tenaga pendidik serta para orang tua yang juga berperan andil dalam mendukung berjalannya kebijakan pertemuan tatap muka, meskipun masih ada beberapa orang tua yang belum mendukung sepenuhnya dalam kebijakan pertemuan tatap muka ini.

Dari aspek struktur birokrasi sistem birokrasi pun yang harus sangat mendukung dalam kebijakan pertemuan tatap muka ini supaya terciptanya peserta didik yang cerdas dan tidak ada lagi yang mengalami hilangnya capaian belajar (learning loss) sehingga kebijakan pertemuan tatap muka ini bisa menjadi manfaat yang baik. Jika keseluruhan aspek tersebut bisa saling bersinergi maka akan sangat membantu dalam pengimplementasian kebijakan pertemuan tatap muka ini. Dan sampai sejauh ini kebijakan pertemuan tatap muka pun telah berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani L. 2022. Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Dumai (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Planing). *Jurnal Niara* Vol. 14 No. 3. Januari 2022.
- Dwi C. B, Amelia A dkk. 2021. Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* E-ISSN: 2721-7957.
- Handyanto S. dan Hidayat A. 2021. Problematika Kebijakan Pembelajaran Bauran Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Memenuhi Hak Atas Pendidikan. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7 (1) 2021 ISSN Online 2614-3569.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. "Kebijakan PTM Terbatas Menyambut Tahun Ajaran Baru 2021/2022." : 1-45.
- Kemdikbud. 2021. Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sekolah Dasar. [dtkp.kemdikbud.go.id](https://dtkp.kemdikbud.go.id/2021/01/pedoman-pembelajaran-tatap-muka-terbatas-sekolah-dasar/). Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- Kemdikbud. 2021. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. [dtkp.kemdikbud.go.id](https://dtkp.kemdikbud.go.id/2021/01/buku-saku-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19/). Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- Kemdikbud. 2021. Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022. [dtkp.kemdikbud.go.id](https://dtkp.kemdikbud.go.id/2021/01/penyelenggaraan-pembelajaran-tatap-muka-tahun-akademik-2021-2022/). Diakses pada tanggal 4 Januari 2021.
- Kurniasari A., dkk. 2020. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*. E-ISSN: 2460-8475.
- Mustafa S. , Mustikaningsih H. , Imayanti R. 2021. Pembelajaran Tatap Muka Pada

Masa Pandemi Covid-19 di SMA.
Kemendikbud: 1-35.

Mursalim, dan Siti W. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14 Nomor 1 2017.

Nugroho M. Marshal dkk. 2020. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Di Indonesia Pada Tahun 2021. Jurnal Publicuho Volume 3 Nomor 3 November-Januari 2020.

Nissa S. F. dan Haryanto A. 2020. Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ika (Ikatan Alumni PGSD UNARS) Vol.8 No. 2 Desember 2020.